

3. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Unsur penunjang urusan pemerintahan diampu oleh Badan yang dipimpin oleh Kepala Badan. Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, unsur penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian Daerah merupakan Badan Tipe B yang terdiri dari 1 (Satu) Sekretariat dan 3 (Tiga) Bidang.

Untuk mendukung fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Kabupaten Wonosobo melalui APBD Tahun 2020 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3.369.236.500,00 Alokasi anggaran dalam penyelenggaraan unsur penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan terealisasi sebesar Rp 2.445.500.934,00 atau sebesar 72,58%. Capaian program pada unsur penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Alokasi Pendanaan

Tabel III. D. 3.1

**Program, Alokasi, Realisasi Anggaran Unsur Penunjang Kepegawaian
serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020**

No	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung	3.369.236.500	2.445.500.934	72,58
1	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	178.000.000	144.832.256	81,37
2	Program Pembinaan dan Pengembangan SDM Aparatur	405.000.000	306.182.139	75,60
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.786.236.500	1.994.486.539	71,58

b. Capaian Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

BKD Kabupaten Wonosobo memiliki fungsi dalam penegakan dan peningkatan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Fungsi peningkatan dan pembinaan disiplin dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja Aparatur, dan secara teknis melekat pada

Sub Bidang Pembinaan Pegawai. Secara umum pembinaan disiplin bagi ASN dilaksanakan dengan menegakkan 9 (sembilan) jalur disiplin PNS, dalam pelaksanaannya BKD Kab. Wonosobo lebih spesifik melaksanakan penegakan dan peningkatan disiplin ASN melalui kegiatan sidak PNS dan penegakan aturan disiplin, kode etik dan perilaku ASN.

Anggaran yang dialokasikan dalam mendukung program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 178.000.000, terdiri dari kegiatan Sidak PNS sebesar Rp. 100.000.000 dan Penegakan Aturan Disiplin, Kode Etik dan Perilaku ASN sebesar Rp. 78.000.000.

- (a) Kegiatan Sidak PNS dilaksanakan pada Bulan Mei, Oktober, November dan Desember 2020. Sidak PNS bertujuan untuk mengetahui statistik tingkat kehadiran PNS serta pembinaan kedisiplinan PNS. Sidak PNS dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari BKD, Inspektorat, Satpol PP, Badan Kesbangpol, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo. Sasaran sidak adalah seluruh perangkat daerah dan sekolah di Kabupaten Wonosobo. Dari target 12 (dua belas) kali sidak PNS, hanya terealisasi sebanyak 8 (delapan) kali, hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Untuk mengatasi permasalahan yang muncul, BKD Kab. Wonosobo mengambil langkah yaitu perangkat daerah agar tetap menyampaikan rekap absensi manual secara rutin. Anggaran sidak PNS sebesar Rp. 100.000.000 dapat teralisasi sebesar Rp. 68.434.874 atau 68,43%.
- (b) Kegiatan lain dalam Program Peningkatan Disiplin Aparatur yaitu Penegakan Aturan Disiplin, Kode Etik dan Perilaku Pegawai ASN. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik. Proses yang dilaksanakan berupa sidang penjatuhannya hukuman disiplin dan pembinaan perceraian. Dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa perangkat daerah terkait antara lain Inspektorat, Satpol PP dan Bagian Hukum.

Target yang ditetapkan dalam kegiatan Penegakan Aturan Disiplin, Kode Etik dan Perilaku Pegawai ASN yaitu 4 (empat) hukuman disiplin dan 24 (dua puluh empat) izin cerai, terealisasi 12 (dua belas) hukuman disiplin dan 26 (dua puluh enam) izin cerai. Capaian realisasi hukuman disiplin dan izin cerai yang cukup tinggi menunjukkan masih perlunya sosialisasi dan pembinaan disiplin dan kode etik bagi ASN secara lebih intens di Kabupaten Wonosobo. Sedangkan untuk serapan anggarannya, kegiatan Penegakan Aturan Disiplin, Kode Etik dan Perilaku Pegawai ASN terealisasi sebesar 97,95% yaitu dari alokasi anggaran Rp. 78.000.000 atau sebesar Rp. 76.397.382.

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- (a) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, Ujian Penyesuaian Ijazah/ Ujian Dinas, dan Fasilitasi Pensiun Pegawai. Total anggaran untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu Rp. 405.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 306.182.139 atau 75,60%.

Setiap ASN memiliki hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi, baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosio kultural. Sebagai upaya peningkatan kapasitas tersebut, BKD Kab. Wonosobo memfasilitasi pelaksanaannya melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Sasaran kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal yaitu seluruh ASN di Kabupaten Wonosobo baik struktural,

fungsi maupun pelaksana dan dilaksanakan sesuai kebutuhan jenis diklat. Pada Tahun 2020 pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal tidak dapat mencapai target yang ditentukan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya lembaga pendidikan dan pelatihan yang tutup atau tidak menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk sementara waktu. Selain itu banyak peserta yang tidak bersedia mengikuti karena kasus terkonfirmasi COVID-19 semakin tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut BKD Kab. Wonosobo tetap memaksimalkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan secara *online* atau secara *daring*.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang dilaksanakan selama tahun 2020 yaitu:

- Pelatihan sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan Ujian sertifikasi keahlian PBJ Pemerintah. Peserta sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang. Pelatihan dilaksanakan secara *daring* sedangkan ujiannya dilaksanakan di Semarang.
- Pendidikan dan pelatihan keprotokolan dan kehumasan, diikuti oleh 20 PNS dari Sekretariat Daerah Kab. Wonosobo
- Pendidikan dan pelatihan *public speaking* diikuti oleh 10 (sepuluh) orang PNS dari BKD Kab. Wonosobo.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal terealisasi sebesar Rp. 216.023.944 dari alokasi anggaran Rp. 300.000.000 atau sebesar 72,01%.

- (b) Kegiatan selanjutnya pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu Ujian Penyesuaian Ijazah/ Ujian Dinas. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000 dan teralisasi Rp. 19.565.000 atau sebesar 65,52%. Kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan karier serta kompetensi bagi PNS, lebih rinci terkait pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah 2020 sebagai berikut:

- Ujian Penyesuaian Ijazah sejumlah 24 PNS, terdiri dari UKPPI Tingkat I sejumlah 8 PNS, UKPPI Tingkat III sejumlah 13 PNS, UKPPI Tingkat IV sejumlah 3 PNS.
- Ujian Dinas sejumlah 37 PNS terdiri dari Ujian Dinas Tingkat I sejumlah 30 PNS dan Ujian Dinas Tingkat II sejumlah 7 PNS.

Kendala yang dihadapi dalam Kegiatan Ujian Penyesuaian Ijazah/ Ujian Dinas yaitu ujian yang biasanya dapat dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun karena situasi pandemi COVID-19 hanya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (c) Kegiatan Fasilitasi Pensiun merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Wonosobo. Kegiatan ini dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dari Januari – Desember. Fasilitasi pensiun dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi pemberkasan bagi calon PNS yang memasuki masa purna tugas sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) pensiun. Batas usia pensiun bagi PNS non guru yaitu 58 tahun dan PNS guru dan eselon 2 yaitu 60 tahun, untuk jabatan fungsional selain guru disesuaikan dengan aturan jabatan fungsionalnya masing – masing. Pada Tahun 2020 target untuk SK Pensiun sebanyak 350 SK dan realisasi sebanyak 372 SK. Sebanyak 22 SK yang melebihi target dikarenakan PNS yang meninggal dunia dan

mengajukan pensiun dini. Secara umum tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pensiun.

3) Program Pembinaan dan Pengembangan SDM Aparatur

Program Pembinaan dan Pengembangan SDM Aparatur terdiri dari beberapa kegiatan. Secara umum program ini bertujuan untuk membentuk ASN yang setia, taat, jujur, berdedikasi, disiplin dan bertanggungjawab. Fungsi pembinaan dan pengembangan SDM Aparatur yaitu memupuk kesetiaan dan ketaatan, meningkatkan tanggungjawab dan semangat kerja, mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan berwibawa, serta memperbesar kemampuan dan ketrampilan SDM Aparatur. Pembinaan dan pengembangan SDM Aparatur juga merupakan upaya pemenuhan hak ASN serta memberikan jenjang karier yang jelas.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung Program Pembinaan dan Pengembangan SDM Aparatur yaitu :

(a) Fasilitasi Diklat Teknis

Alokasi anggaran diklat teknis sebesar Rp. 100.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 84.125.576 atau sebesar 84,13%.

Dalam kegiatan diklat teknis, ASN yang diikutsertakan sesuai dengan jenis diklat serta kebutuhan akan pengembangan keahlian ASN pada setiap organisasinya, beberapa diklat teknis yang diikuti ASN Pemerintah Kabupaten Wonosobo yaitu : Pengiriman peserta Pelatihan Penetrasi Pasar Eksport Timur Tengah, Sertifikasi Kompetensi Komisaris Kelas Weekend , Pelatihan Fungsional Penera Angkatan I Tahun 2020, dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Informasi Publik tahun 2020. Kegiatan dilaksanakan secara *daring* dan *luring*. Melalui pelaksanaan Diklat Teknis ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi ASN sesuai bidang tugas dan keahliannya.

(b) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas.

Kegiatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Administrator dan Pengawas dilaksanakan dalam kurun waktu Februari – Agustus 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama, adminisitrator dan pengawas. Pengisian JPT Pratama dilaksanakan melalui seleksi terbuka. Pelaksanaan seleksi terbuka dilaksanakan untuk 10 JPT Pratama yang kosong dari 6 jabatan yang ditargetkan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan struktur perangkat daerah dan pejabat eselon II yang memasuki masa purna tugas. Untuk jabatan yang diisi yaitu Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam pelaksanaan seleksi BKD Kabupaten Wonosobo bekerjasama dengan akademisi

yaitu UNSOED Purwokerto. Peserta seleksi adalah seluruh ASN yang telah memenuhi persyaratan baik dari jabatan struktural maupun fungsional.

Alokasi anggaran untuk kegiatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas sebesar Rp. 706.560.000 dan terealisasi Rp. 666.335.892 atau 94,31%. Realisasi Kendala yang dihadapi yaitu meskipun pelaksanaan seleksi telah selesai namun belum dapat dilaksanakan pelantikan. Hal ini dikarenakan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

(c) Penetapan Kinerja Individu Pegawai ASN

Alokasi anggaran untuk kegiatan Penetapan Kinerja Individu Pegawai ASN Tahun 2020 sebesar Rp. 50.000.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 38.544.000 atau 77,11%. Kegiatan Penetapan Kinerja Individu Pegawai ASN dilaksanakan dengan melaksanakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Sasaran sosialisasi yaitu seluruh ASN di Kabupaten Wonosobo, dikarenakan adanya pandemi COVID-19, kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang rencana dilaksanakan secara paralel ke seluruh perangkat daerah hanya dapat diikuti oleh perwakilan perangkat daerah yaitu pengelola kepegawaian.

(d) Fasilitasi Diklat Fungsional

Kegiatan Fasilitasi Diklat Fungsional ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknis fungsional ASN di Kabupaten Wonosobo. Alokasi anggaran untuk Fasilitasi Diklat Fungsional semula sebesar Rp. 250.000.000, namun direfocusing untuk mendukung kegiatan penanggulangan wabah COVID-19 di Kabupaten Wonosobo. Dengan demikian kegiatan Fasilitasi Diklat Fungsional pada Tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan.

(e) Fasilitasi Pelayanan Kesehatan PNS

Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan PNS dilaksanakan untuk memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi ASN. Kegiatan fasilitasi pelayanan kesehatan PNS diselenggarakan secara terpusat di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi PNS yakni sebanyak 36 kali (setiap Minggu ke 3 pada hari senin, rabu, jumat), PNS yang mengikuti diperkirakan mencapai kurang lebih 60 orang setiap bulannya. Kegiatan ini dilaksanakan sampai dengan bulan April 2020 karena terhalang pandemi Covid 19. Alokasi anggaran untuk fasilitasi pelayanan kesehatan PNS sebesar Rp. 55.000.000 terealisasi sebesar Rp. 9.606.000 atau sebesar 17,47%.

(f) Seleksi Pegawai ASN

Alokasi anggaran untuk kegiatan Seleksi Pegawai ASN Tahun 2020 sebesar Rp. 1.372.710.500, serapan anggaran sebesar Rp. 817.224.947 atau sebesar 59,53%. Seleksi Pegawai ASN merupakan proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil formasi Tahun 2019

melalui Computer Assistant Test (CAT) untuk Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) dan Seleksi Kemampuan Bidang (SKB).

Jumlah formasi yang akan diisi dalam seleksi CPNS Tahun 2020 yaitu sebanyak 327 formasi dan setelah dilaksanakan tes terisi sejumlah 314 formasi. Seleksi CPNS dilaksanakan pada Bulan Februari dan September Tahun 2020 di Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Jumlah pendaftar Seleksi CPNS sebanyak 4.957 orang, setelah lulus verifikasi administrasi peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebanyak 4.695 peserta, Seleksi tahap kedua yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebanyak 772 peserta. Ada formasi tidak terisi dikarenakan pada tahapan seleksi ada yang tidak ada pendaftar, tidak lolos seleksi administrasi dan tidak lolos SKD. Untuk serapan anggarannya hanya terserap 59,53% dikarenakan persiapan pelaksanaan kegiatan seleksi (rapat dan koordinasi dengan pihak pelaksana Universitas Dian Nuswantoro Semarang) dilaksanakan secara *daring*.

(g) Penyempurnaan SIMPEG

Data kepegawaian di Kabupaten Wonosobo telah terintegrasi dalam aplikasi SIMPEG. Aplikasi ini memuat seluruh data ASN di Kabupaten Wonosobo dan dikelola secara mandiri oleh BKD Kabupaten Wonosobo. Dalam perkembangan penggunaan aplikasi SIMPEG tentunya perlu pemeliharaan dan pengembangan agar aplikasi SIMPEG semakin aplikatif dalam membantu menyajikan dan mengolah data kepegawaian, serta meningkatkan layanan kepegawaian. Alokasi anggaran penyempurnaan SIMPEG Tahun 2020 sebesar Rp. 175.000.000 dan terelisasi sebesar Rp. 147.500.000 (84,29%).

Penyempurnaan SIMPEG BKD Kabupaten Wonosobo bekerjasama dengan PT. Dinustek Semarang, pelaksanaannya pada Bulan Oktober – Desember 2020. Target penyempurnaan SIMPEG adalah 2 modul dan teralisasi 4 modul. Penyempurnaan aplikasi dilaksanakan pada penyesuaian dan penambahan modul e-cuti, e-ijin belajar/ tugas belajar, e-diklat, e-pensiun dan e-hukdis. Selain penyempurnaan pada aplikasinya, untuk updating data pada SIMPEG, BKD Kabupaten Wonosobo juga melaksanakan rekonsiliasi data kepegawaian dengan seluruh perangkat daerah baik secara *daring* maupun *luring*.

(h) Kesamaptaan PNS

Kegiatan Kesamaptaan PNS dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan kesamaptaan atau olah raga secara bersama – sama untuk ASN di Kabupaten Wonosobo secara rutin setiap hari Jumat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran ASN. Jumlah serapan anggaran dari pagu Rp. 26.000.000 hanya terserap sebesar Rp. 6.400.000 (24,62%), hal ini dikarenakan seluruh kegiatan kesamaptaan tidak lagi dilaksanakan karena adanya pandemi COVID-19.

(i) Fasilitas Kenaikan Pangkat Pegawai.

Kegiatan Fasilitas Kenaikan Pangkat Pegawai bertujuan untuk memfasilitasi seluruh kenaikan pangkat PNS pada seluruh jenjang jabatan. Dari target 775 SK dapat terealisasi 779 SK, Kenaikan pangkat diproses berdasarkan usulan dari setiap perangkat daerah

sehingga menyebabkan realisasi SK kenaikan pangkat yang terbit melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2020. Alokasi anggaran fasilitasi kenaikan pangkat pegawai sebesar Rp. 60.000.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 59.079.955 (98,47%).

(j) Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS bertujuan untuk memetakan kompetensi sumber daya manusia aparatur di Kabupaten Wonosobo. Untuk mengetahui potensi ASN salah satunya dilakukan dengan penelusuran kader potensial melalui talent pool. Sasaran dalam asessment pemetaan kompetensi jabatan struktural ini adalah 366 orang PNS. Dalam pelaksanaannya BKD Kabupaten Wonosobo berkerjasama dengan Universitas Negeri Surakarta (UNS). Output kegiatan ini berupa dokumen peraturan bupati tentang penelusuran kader potensial melalui talent pool dan hasil assessment. Kendala pada kegiatan ini yaitu penyusunan penggabungan data talent pool berdasarkan hasil assesment dan pertimbangan obyektif kepegawaian lainnya masih terus berlangsung, untuk itu perlu dilakukan kajian untuk Standar Operasional dan Prosedur dalam penyusunan talent pool.

Alokasi anggaran Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS sebesar Rp. 75.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 51.956.587 (69,28%).

(k) Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional dalam Penyusunan Angka Kredit

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional dalam Penyusunan Angka Kredit bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan untuk jabatan fungsional pranata komputer (Prakom). Sasaran kegiatan ini adalah bagi 9 orang Prakom yang mengalami kesulitan dalam penyusunan angka kredit dan kenaikan pangkat. Narasumber dalam fasilitasi peningkatan kapasitas Prakom ini dari Tim Penilai Penetapan Angka Kredit (PAK) Pranata Komputer Provinsi Jawa Tengah. Melalui kegiatan ini diharapkan Prakom tidak lagi menemui kesulitan dalam penyusunan angka kredit dan kenaikan pangkatnya. Serapan anggaran pada kegiatan ini hanya 85,25% (Rp. 38.364.000) dari anggaran total sebesar Rp. 45.000.000. dikarenakan terdapat komponen biaya perjalanan dinas luar daerah yang tidak dapat dilaksanakan.

(l) Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi dilaksanakan dalam bentuk penyusunan produk hukum yaitu Peraturan Bupati Wonosobo tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi dan Fasilitasi Penerbitan SK Penghargaan Satya Lancana Karya Satya. Dalam pelaksanaannya penyusunan peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh tim dengan mempedomani aturan yang lebih tinggi. Output dari kegiatan ini adalah Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000, kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi serapan anggarannya mencapai Rp 23.709.582 atau sebesar 94,84%.

(m) Fasilitasi Penyelesaian Administrasi kepegawaian

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Administrasi kepegawaian bertujuan untuk menyelesaikan keperluan administrasi dalam proses fasilitasi pengajuan mutasi PNS antar daerah baik mutasi masuk maupun mutasi keluar sesuai tata cara pelaksanaan mutasi dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2019. Dari target 8 laporan usulan mutasi, realisasi melebihi target yaitu 26 laporan usulan mutasi. Serapan anggaran untuk kegiatan ini adalah 79,44% atau sebesar Rp. 7.943.582 dari anggaran total sebesar Rp. 10.000.000.

(n) Pengangkatan Sumpah Jabatan dan PNS

Kegiatan Pengangkatan Sumpah Jabatan dan PNS dimaksudkan untuk melaksanakan pelantikan dalam pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan fungsional. Dalam pelaksanaannya di Tahun 2020 telah dilakukan pengangkatan sumpah JPT 12 orang eselon II, 80 orang eselon III dan IV, 58 kepala sekolah, 1 P2UPD, 5 Kesbangpol dan 6 Guru. Realisasi pelaksanaan sumpah jabatan tidak mencapai target dikarenakan pandemic COVID-19 juga karena masa jabatan bupati yang memasuki masa akhir jabatan sehingga proses pengisian jabatan Struktural dan Fungsional ditunda. Alokasi anggaran kegiatan Pengangkatan Sumpah Jabatan dan PNS sebesar Rp. 34.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 11.932.500 (35,10%).

c. Capaian Kinerja Program

Tabel III. D. 3.2

Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap RKPD Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020				Target (RPJMD) 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status capaian	
1	Persentase capaian sasaran kinerja pegawai dengan target	%	99,94%	90%	99,81%	110,90%	ST	90%
2	Persentase struktur jabatan dan eselonering yang terisi	%	91,93%	100%	84,47%	84,47%	T	100%
3	Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya	%	91,93%	70%	84,47%	124,22%	ST	70%

III.D.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020				Target (RPJMD) 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status capaian	
4	Persentase Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan	%	45,78%	90%	35,71%	42,01%	SR	100%
5	Persentase pegawai ASN yang mendapat Hukuman Disiplin (Berat, Sedang, Ringan)	%	0,0596	0%	0,19%	5,96%	ST	0%

Sumber : BKD Kabupaten Wonosobo, 2020

Keterangan Status Capaian :

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	

Sumber : Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Trantibum Linmas pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Terdapat 5 indikator Kinerja Progra, unsur penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
- Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 3 indikator.

- Realisasi Kinerja Program Kategori Tinggi sebanyak 1 indikator.
- Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Rendah sebanyak 1 indikator.

Dari data di atas dari target indikator program RPJMD yang ditetapkan masih ada indikator yang sangat rendah yaitu Persentase Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan. Hal ini dikarenakan belum ada Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan bagi ASN di Kabupaten Wonosobo. Selain itu, sebaran peta kebutuhan pendidikan dan pelatihan masing – masing jabatan juga belum disusun, dan anggaran kebutuhan pendidikan dan pelatihan perlu ditingkatkan sesuai jenis diklat pada masing – masing jabatan.

Dari capaian – capaian tahun 2020 di atas, masih ada indikator yang perlu diakselerasi yaitu Persentase struktur jabatan dan eselonering yang terisi. Meskipun pada Tahun 2020 pengisian eselonering jabatan tidak dapat dilaksanakan karena akhir masa jabatan Bupati, tentunya pada Tahun 2021 harus segera dilaksanakan pengisian bagi jabatan yang kosong agar pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat berjalan dengan lebih maksimal.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Catatan DPRD

Tabel III. D. 3.3
Matriks Tindak lanjut atas Rekomendasi/Catatan DPRD

No	Permasalahan	Solusi
1.	Masih banyak terdapat Tenaga Pendidik diluar ASN yang menuntut perbaikan kesejahteraan sehingga perlu dicarikan formulasi penyelesaiannya	Upaya peningkatan kesejahteraan Guru Non ASN telah dilakukan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu dengan meningkatkan upah tenaga Guru Non ASN (eks K-II dan Non K-II) di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dengan besaran penghasilan sebagai berikut : a. Guru kelas K-II Rp. 1.600.000,00/orang/bulan; b. Guru mapel K-II Rp. 1.500.000,00/orang/bulan; c. PTT K-II Rp. 1.400.000,00/orang/bulan; d. Guru Kelas Non K-II Rp. 1.100.000,00/orang/bulan; e. Guru Mapel Non K-II Rp. 1.000.000,00/orang/bulan; f. PTT Non K-II Rp. 900.000,00/orang/bulan; g. Guru Paud/TK Rp. 750.000,00/orang/bulan.
2.	Keterbatasan jumlah ASN, maka perlu adanya Pemanfaatan Teknologi dan optimalisasi dari jumlah ASN yang ada	Keterbatasan jumlah ASN secara bertahap mulai tercukupi dengan penambahan ASN baru tahun 2020 sejumlah 314 CPNS yang terdiri : a. Tenaga Teknis 76 orang, b. Tenaga Guru 166 orang dan c. Tenaga Kesehatan 85 orang Serta ASN PPPK sejumlah 358 orang yang terdiri : a. Tenaga Guru : 286 b. Penyuluh Pertanian (Teknis): 68 c. Tenaga Kesehatan : 4 orang

III.D.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No	Permasalahan	Solusi
		Upaya lain dalam mengatasi keterbatasan jumlah ASN adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada di Perangkat Daerah, baik pemenuhan <i>hardware</i> , <i>software</i> maupun pelatihan dalam mengaplikasikannya.

e. Permasalahan dan Solusi

Tabel III. D. 3.4

Matriks Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi
1.	Capaian Kinerja Persentase Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan masih rendah disebabkan masih terdapat pejabat yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Kondisi ini terjadi karena penyelenggaraan Diklat Pim membutuhkan biaya tinggi. Jumlah anggaran diklat kepemimpinan untuk tahun 2020 sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dialihkan untuk refocusing penanganan Covid-19 sehingga tahun 2020 tidak mengirimkan diklat kepemimpinan.	Upaya akses fasilitasi ke lembaga penyelenggara diklat kepemimpinan baik instansi pusat dan daerah sehingga akan mengurangi kekurangan anggaran di daerah